

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Sastyo Aji Darmawan, S.H., M.E.



Mengupas Tuntas KONTRAK BERBASIS KINERJA

**Dari Teori Global ke
Praktik PBJ di Indonesia**

*Panduan Komprehensif Implementasi Kontrak
Berbasis Kinerja untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang Efektif dan Akuntabel di Indonesia*



MENGUPAS TUNTAS

KONTRAK BERBASIS KINERJA

(KBBK)

Dari Teori Global ke Praktik PBJ di Indonesia

Panduan Komprehensif Implementasi Kontrak Berbasis Kinerja
untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efektif dan
Akuntabel di Indonesia

PENULIS:

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP.

Sastyo Aji Darmawan, S.H., M.E.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

MENGUPAS TUNTAS KONTRAK BERBASIS KINERJA (KBK)

Dari Teori Global ke Praktik PBJ di Indonesia

Copyright @2025 By Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP. & Sastyo Aji Darmawan, S.H., M.E.

All right reserved

Penulis

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP.

Sastyo Aji Darmawan, S.H., M.E.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

AtikaNS

Editor

Merry Nia Irawati, M.Pd.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-202-483-6

Cetakan ke-1, Juni 2025

15 x 23 cm, xviii + 195 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025068714, 17 Juni 2025

Pencipta
Nama : Agus Arif Rakhman, M.M, CPSP. dan Sastyo Aji Darmawan, S.H., M.E.
Alamat : Kav. Almaas III Blok 32A Ganjil No 33, Ds. Sukamukti, Katapang, Kab. Bandung, Jawa Barat, 40921
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Agus Arif Rakhman, M.M, CPSP. dan Sastyo Aji Darmawan, S.H., M.E.
Alamat : Kav. Almaas III Blok 32A Ganjil No 33, Ds. Sukamukti, Katapang, Kab. Bandung, Jawa Barat, 40921
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : MENGUPAS TUNTAS KONTRAK BERBASIS KINERJA (KBK): Dari Teori Global ke Praktik PBJ di Indonesia
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 17 Juni 2025, di Kota Adm. Jakarta Pusat
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya

Nomor Pencatatan : 000908975

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Lanskap pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia senantiasa berada dalam gerak dinamis, sebuah perjalanan panjang reformasi yang tak henti-hentinya mencari bentuk terbaik demi mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja negara. Di tengah upaya berkelanjutan ini, lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menandai sebuah titik balik yang krusial. Regulasi ini bukan sekadar pembaruan, melainkan sebuah undangan untuk melakukan transformasi paradigma dalam cara kita memandang dan melaksanakan pengadaan.

Inovasi paling signifikan yang diintroduksi oleh Perpres ini adalah pelembagaan formal Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) atau *Performance-Based Contract* (PBC) sebagai salah satu jenis kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Langkah ini merupakan respons strategis terhadap keterbatasan model pengadaan konvensional yang telah kita kenal selama bertahun-tahun. Model lama, dengan fokusnya yang terlalu besar pada pemenuhan input dan ketaatan pada proses, seringkali mengesampingkan tujuan utama dari setiap pengadaan: pencapaian *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang berkualitas dan berdampak nyata bagi publik. Akibatnya, kita kerap dihadapkan pada inefisiensi anggaran, kualitas yang tidak optimal, kurangnya dorongan inovasi dari penyedia, dan sulitnya mengukur akuntabilitas kinerja secara substantif.

KBK hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Dengan menggeser fokus dari "apa yang dibeli" menjadi "apa yang ingin dicapai", KBK memaksa kita untuk berpikir lebih

strategis, mendefinisikan kebutuhan berbasis hasil, dan mengaitkan pembayaran secara langsung dengan kinerja yang terukur. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa model lama mungkin tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kebutuhan publik dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik di era modern, selaras dengan tren global yang menekankan pada kinerja, hasil, dan akuntabilitas sektor publik.

Namun, lahirnya sebuah regulasi hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi di lapangan. Bagaimana para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, penyedia barang/jasa, auditor, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat menerjemahkan amanat Perpres ini menjadi praktik pengadaan yang efektif dan akuntabel? Bagaimana cara merancang KBK yang solid, merumuskan Indikator Kinerja Kunci (KPI) yang tepat, hingga mengelola dan memantaunya secara efektif?

Di tengah kebutuhan mendesak inilah, buku **Mengupas Tuntas Kontrak Berbasis Kinerja (KBK): Dari Teori Global ke Praktik PBJ di Indonesia** hadir sebagai jembatan esensial yang menghubungkan kerangka regulasi baru dengan panduan implementasi yang komprehensif, aplikatif, dan konkret. Buku ini dirancang bukan sebagai bacaan teoretis semata, melainkan sebagai "buku manual" dan mitra berpikir bagi spektrum luas pembaca, mulai dari PPK, Pokja Pemilihan, penyedia, auditor, akademisi, hingga para perencana anggaran dan pengambil kebijakan.

Melalui buku ini, pembaca akan dibekali dengan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai prinsip-prinsip inti KBK, panduan praktis langkah demi langkah dalam merancang KBK yang efektif—mulai dari analisis kelayakan hingga penyusunan klausul-klausul kritis, serta contoh-contoh konkret penerapan KBK pada berbagai jenis pengadaan, baik itu pengadaan barang, jasa pemeliharaan, pekerjaan konstruksi, maupun jasa konsultasi. Lebih dari itu, buku ini juga mengupas seni mengelola KBK, membangun kemitraan strategis,

menangani ketidaksesuaian kinerja, hingga mengidentifikasi pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan.

Adopsi KBK adalah sebuah perjalanan kolektif. Ia menuntut perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi yang kuat dari seluruh ekosistem pengadaan di Indonesia. Kami berharap, buku ini dapat menjadi kompas navigasi Anda dalam menempuh perjalanan transformasi tersebut. Mari bersama-sama kita songsong era baru pengadaan barang/jasa pemerintah—sebuah era di mana setiap rupiah anggaran tidak hanya dibelanjakan sesuai aturan, tetapi juga cerdas dalam menghasilkan kinerja dan dampak terbaik bagi kemajuan bangsa.

Selamat membaca dan selamat berkarya!

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Sastyo Aji Dharma, S.H., M.E.

PRAKATA

Mengapa buku ini penting sekarang? (Konteks Perpres No. 46 Tahun 2025 dan kebutuhan akan PBJ yang lebih baik)

Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menandai sebuah titik balik krusial dalam lanskap pengadaan publik di Indonesia.¹ Salah satu inovasi paling signifikan yang diintroduksi oleh regulasi ini adalah pelembagaan formal Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) atau *Performance-Based Contract* (PBC) sebagai salah satu jenis kontrak yang dapat digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Kebijakan ini bukan sekadar penambahan nomenklatur, melainkan sebuah langkah strategis yang mencerminkan upaya reformasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja negara.

Selama bertahun-tahun, model pengadaan konvensional di Indonesia kerap menghadapi berbagai keterbatasan.¹ Fokus yang terlalu besar pada pemenuhan input dan proses, seringkali mengesampingkan pencapaian output (keluaran) atau bahkan outcome (hasil) yang sebenarnya diharapkan. Hal ini dapat berujung pada inefisiensi anggaran, kualitas barang/jasa yang tidak optimal, kurangnya dorongan inovasi dari pihak penyedia, serta kesulitan dalam mengukur akuntabilitas kinerja secara nyata. Kebutuhan akan sistem PBJ yang lebih baik, yang mampu memberikan *value for money* maksimal bagi negara dan

masyarakat, menjadi semakin mendesak. Dalam konteks inilah, KBK hadir sebagai alternatif yang menjanjikan. Dengan menggeser fokus dari "apa yang dibeli" menjadi "apa yang ingin dicapai", KBK mendorong pemerintah untuk mendefinisikan secara jelas hasil kinerja yang diinginkan dan mengaitkan pembayaran secara langsung dengan pencapaian target-target tersebut.¹ Perpres No. 46 Tahun 2025, dengan mengakomodasi KBK, memberikan landasan hukum yang kuat bagi para praktisi pengadaan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil ini.

Penting untuk dipahami bahwa introduksi KBK melalui Perpres No. 46 Tahun 2025 merupakan respons pemerintah terhadap tantangan-tantangan yang selama ini melekat dalam praktik PBJ nasional. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa model-model lama mungkin tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kebutuhan publik dan tuntutan akan tata kelola yang baik. Langkah ini juga selaras dengan tren global di mana banyak negara telah lebih dahulu mengadopsi prinsip-prinsip *New Public Management*, yang menekankan pada kinerja, hasil, dan akuntabilitas sektor publik. Dengan demikian, Perpres ini bukan hanya sekadar perubahan regulasi, tetapi juga sebuah undangan untuk transformasi paradigma dalam cara pemerintah melakukan pengadaan. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan mendesak akan panduan yang komprehensif, aplikatif, dan konkret dalam mengimplementasikan KBK di Indonesia, seiring dengan berlakunya kerangka regulasi baru tersebut.

Untuk siapa buku ini ditujukan? (PPK, Pokja Pemilihan, Penyedia, Akademisi, Auditor, dll.)

Buku ini dirancang untuk menjadi panduan esensial bagi spektrum luas pemangku kepentingan yang terlibat dan berkepentingan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah di Indonesia, khususnya mereka yang akan bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan

implementasi Kontrak Berbasis Kinerja (KBK). Target pembaca utama meliputi:

1. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):** Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kontrak, PPK akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kapan dan bagaimana KBK tepat digunakan, cara merumuskan kebutuhan berbasis kinerja, menyusun Indikator Kinerja Kunci (KPI) yang efektif, merancang skema pembayaran dan insentif yang tepat, mengelola risiko, serta memantau dan mengevaluasi kinerja penyedia dalam konteks KBK. Buku ini akan menjadi bekal krusial bagi PPK dalam menjalankan peran barunya yang lebih strategis dalam KBK.
2. **Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan):** Pokja Pemilihan akan dibekali pengetahuan untuk menyusun dokumen pemilihan yang mengakomodasi prinsip-prinsip KBK, mengevaluasi penawaran yang berorientasi kinerja, dan memilih penyedia yang paling mampu memberikan hasil yang diharapkan. Pemahaman tentang bagaimana menilai kemampuan inovasi dan manajemen risiko penyedia akan menjadi sangat relevan.
3. **Penyedia Barang/Jasa (Providers):** Bagi penyedia, buku ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana memahami kebutuhan berbasis kinerja, menyusun proposal penawaran yang kompetitif untuk KBK, mengelola pelaksanaan kontrak yang berfokus pada pencapaian KPI, serta bagaimana berinovasi untuk mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Ini akan membantu penyedia beradaptasi dengan model kontrak baru dan memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah.
4. **Akademisi dan Peneliti:** Buku ini dapat menjadi referensi penting bagi para akademisi dan peneliti di bidang administrasi publik, manajemen pengadaan, hukum kontrak, dan kebijakan publik. Materi yang disajikan, mulai dari landasan teoretis global hingga praktik implementasi di

Indonesia, serta analisis tantangan dan faktor keberhasilan, dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, pengembangan kurikulum, dan diskursus ilmiah mengenai KBK.

5. **Auditor (Internal dan Eksternal):** Auditor, baik dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan memperoleh pemahaman tentang aspek-aspek spesifik yang perlu diperhatikan dalam mengaudit KBK. Ini mencakup evaluasi terhadap perumusan KPI, mekanisme pengukuran kinerja, kewajaran skema insentif dan penalti, serta efektivitas pencapaian *value for money* melalui KBK.
6. **Perencana Anggaran dan Pengambil Kebijakan:** Pihak yang terlibat dalam perencanaan anggaran dan perumusan kebijakan pengadaan akan mendapatkan perspektif mengenai potensi KBK dalam optimalisasi anggaran, peningkatan kualitas layanan publik, serta bagaimana regulasi turunan dan ekosistem pendukung perlu dibangun untuk menyukseskan implementasi KBK.
7. **Konsultan Pengadaan dan Praktisi Hukum:** Para konsultan yang memberikan pendampingan dalam proses PBJ serta praktisi hukum yang menangani aspek legal kontrak pemerintah akan menemukan panduan praktis mengenai penyusunan dokumen KBK yang solid dan strategi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.
8. **Mahasiswa:** Mahasiswa di bidang terkait akan mendapatkan sumber belajar yang komprehensif mengenai salah satu inovasi penting dalam sistem pengadaan modern.

Dengan menyasar audiens yang beragam ini, buku ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman kolektif dan peningkatan kapasitas seluruh ekosistem PBJ di Indonesia dalam menyongsong era pengadaan yang lebih berorientasi pada kinerja.

Apa yang akan pembaca dapatkan dari buku ini?

Pembaca buku ini akan memperoleh serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang komprehensif dan aplikatif terkait Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah di Indonesia. Secara spesifik, pembaca akan mendapatkan:

1. **Pemahaman Konseptual yang Mendalam:** Buku ini akan mengupas tuntas konsep dasar KBK, mulai dari definisi, prinsip-prinsip inti (fokus pada output/outcome, pengukuran kinerja, pembagian risiko, insentif, dan *value for money*), hingga sejarah evolusi KBK di tingkat global, termasuk *best practices* dari berbagai negara dan sektor.¹ Pembaca akan memahami "apa, mengapa, dan bagaimana" KBK secara fundamental.
2. **Analisis Regulasi Terkini:** Pembaca akan mendapatkan analisis mendalam mengenai landasan hukum KBK di Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta keterkaitannya dengan jenis kontrak lain dan potensi regulasi turunan yang diperlukan.¹
3. **Panduan Praktis Perancangan KBK yang Efektif:** Buku ini akan memberikan panduan langkah demi langkah dalam merancang KBK, mulai dari analisis kelayakan, penetapan *baseline* kinerja, perumusan *Statement of Objectives* (SOO) atau *Statement of Work* (SOW) berbasis kinerja, teknik merumuskan Indikator Kinerja Kunci (KPI) yang SMART, hingga merancang mekanisme pembayaran berbasis kinerja, struktur insentif dan penalti, serta strategi alokasi dan manajemen risiko.¹ Pembaca juga akan dipandu dalam menyusun dokumen KBK beserta klausul-klausul kritisnya.³⁴
4. **Aplikasi Konkret pada Berbagai Jenis Pengadaan:** Bagian paling aplikatif dari buku ini akan menyajikan contoh-contoh konkret implementasi KBK pada berbagai jenis pengadaan, seperti pengadaan barang (misalnya, alat kesehatan dengan jaminan *uptime*, armada kendaraan dengan target efisiensi), jasa pemeliharaan (misalnya, jalan

berbasis kondisi, gedung dengan jaminan ketersediaan fasilitas), jasa penunjang (kebersihan, keamanan, catering, *call center*), pekerjaan konstruksi (termasuk model DBOM dan target hemat energi), hingga jasa konsultasi (dengan fokus pada dampak atau implementasi rekomendasi). Setiap jenis pengadaan akan disertai contoh KPI khas dan studi kasus pembelajaran.³⁶

5. **Strategi Pengelolaan, Pemantauan, dan Evaluasi KBK:** Pembaca akan mempelajari seni mengelola KBK, membangun kemitraan strategis dengan penyedia, sistem pemantauan dan pengukuran kinerja yang andal, penanganan ketidaksesuaian kinerja, penyelesaian sengketa, hingga evaluasi pasca kontrak dan pembelajaran berkelanjutan.²⁷
6. **Pemahaman Mendalam tentang Tantangan dan Kunci Sukses:** Buku ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi KBK di Indonesia, seperti kurangnya pemahaman SDM, kesulitan merumuskan KPI, keterbatasan data, resistensi perubahan, dan potensi *gaming the system*.¹ Sekaligus, akan dipaparkan faktor-faktor kunci keberhasilan implementasinya.
7. **Visi dan Langkah Membangun Ekosistem KBK:** Pembaca akan diajak melihat visi ke depan KBK sebagai norma baru PBJ di Indonesia, serta langkah-langkah membangun ekosistem pendukungnya, termasuk peran pelatihan, sertifikasi, pedoman teknis, dan komunitas praktisi.¹¹
8. **Contoh Praktis dan Alat Bantu:** Melalui lampiran, pembaca akan mendapatkan glosarium istilah KBK, contoh daftar periksa kesiapan implementasi, contoh kerangka KPI, dan studi kasus detail yang akan memperkaya pemahaman praktis.

Secara keseluruhan, buku ini bertujuan untuk memberdayakan pembaca dengan pengetahuan dan alat yang dibutuhkan untuk bertransisi dari pengadaan tradisional menuju pengadaan berbasis kinerja yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan inovatif, sejalan dengan amanat Perpres No. 46 Tahun 2025 dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, inspirasi, dan kontribusi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

Keluarga tercinta, atas doa, pengertian, dan dukungan moril yang tak henti-hentinya diberikan selama proses penulisan buku ini. Kesabaran dan dorongan semangat dari keluarga menjadi sumber energi yang luar biasa.

Para pakar dan praktisi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang karya-karya, pemikiran, serta pengalamannya telah banyak dirujuk dan menjadi inspirasi dalam penyusunan buku ini. Diskusi dan pembelajaran dari berbagai seminar, lokakarya, serta publikasi ilmiah sangatlah berharga.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, atas perannya yang sentral dalam mengembangkan regulasi dan ekosistem pengadaan di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang menjadi salah satu pemicu utama penulisan buku ini adalah bukti nyata komitmen untuk terus memajukan sistem PBJ nasional.

Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, serta para Penyedia Barang/Jasa di seluruh Indonesia yang berada di garda terdepan implementasi kebijakan pengadaan. Dedikasi dan tantangan yang dihadapi sehari-hari menjadi motivasi untuk menghasilkan panduan yang relevan dan aplikatif.

Kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang terus mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pengadaan publik. Kontribusi pemikiran kritis dan analitis sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan.

Para auditor, baik internal maupun eksternal, yang memegang peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas proses pengadaan. Masukan dan perspektif dari sisi pengawasan sangat memperkaya pemahaman mengenai aspek-aspek krusial dalam Kontrak Berbasis Kinerja.

Seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini, mulai dari editor, penata letak, hingga tim pemasaran, atas kerja keras dan profesionalismenya.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia, khususnya dalam mengimplementasikan Kontrak Berbasis Kinerja demi tercapainya layanan publik yang lebih berkualitas, efisien, dan akuntabel. Segala kekurangan dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan masukan konstruktif akan diterima dengan tangan terbuka untuk perbaikan di masa mendatang.

QR Code

Kumpulan Kertas Kerja Buku "Kontrak Berbasis Kinerja"

Dengan mengakses QR Code ini, Anda menyetujui bahwa:

1. Penggunaan Eksklusif: QR Code ini mengandung materi yang hanya boleh diakses dan digunakan oleh pembeli buku "Kontrak Berbasis Kinerja". Hak akses ini bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan.
2. Larangan Penyebarluasan: Anda dilarang untuk menyebarluaskan, membagikan, atau mengizinkan pihak lain mengakses isi QR Code ini tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis buku.
3. File pada QR Code ini hanya diizinkan untuk di download, dilarang untuk di edit isinya pada link, silahkan anda download terlebih dahulu kemudian silahkan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk penggunaannya
4. Sanksi Hukum: Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya serta peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, sanksi pidana dan/atau denda atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait lainnya.
5. Pertanggungjawaban: Anda bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan QR Code ini, baik yang dilakukan oleh Anda maupun pihak ketiga yang memperoleh akses melalui Anda.
6. Dengan menggunakan QR Code ini, Anda menyatakan pemahaman dan persetujuan atas semua ketentuan yang telah dijelaskan.



SCAN ME

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PRAKATA	v
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
QR CODE: Kumpulan Kertas Kerja Buku	
"Kontrak Berbasis Kinerja"	xv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAGIAN 1

MENGENAL KONTRAK BERBASIS KINERJA (KBK) – LANDASAN DAN KONSEP	1
❖ Bab 1: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Tradisional vs. Kontrak Berbasis Kinerja.....	2
❖ Bab 2: Mengapa KBK? Manfaat dan Nilai Tambah untuk PBJ Indonesia.....	13
❖ Bab 3: KBK dalam Kerangka Regulasi PBJ Indonesia----	17

BAGIAN 2

MERANCANG KONTRAK BERBASIS KINERJA YANG EFEKTIF	25
❖ Bab 4: Langkah Awal: Kapan dan Untuk Apa KBK Tepat Digunakan?.....	26
❖ Bab 5: Jantung KBK: Mendefinisikan Hasil (Outcome) dan Indikator Kinerja Kunci (KPI).....	35
❖ Bab 6: Mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja dan Struktur Insentif	49
❖ Bab 7: Alokasi dan Manajemen Risiko dalam KBK	59
❖ Bab 8: Menyusun Dokumen Kontrak Berbasis Kinerja--	68

BAGIAN 3

IMPLEMENTASI KBK PADA BERBAGAI JENIS

PENGADAAN (APLIKATIF & KONKRET)-----	79
❖ Bab 9: KBK untuk Pengadaan Barang -----	80
❖ Bab 10: KBK untuk Jasa Pemeliharaan -----	90
❖ Bab 11: KBK untuk Jasa Penunjang (Supporting Services) -----	99
❖ Bab 12: KBK untuk Pekerjaan Konstruksi -----	108
❖ Bab 13: KBK untuk Jasa Konsultansi-----	121

BAGIAN 4

MENGELOLA, MEMANTAU, DAN MENGEVALUASI

KONTRAK BERBASIS KINERJA -----	133
❖ Bab 14: Seni Mengelola Kontrak Berbasis Kinerja -----	134
❖ Bab 15: Sistem Pemantauan dan Pengukuran Kinerja --	140
❖ Bab 16: Penanganan Ketidaksesuaian Kinerja dan Penyelesaian Sengketa -----	150
❖ Bab 17: Evaluasi Pasca Kontrak dan Pembelajaran Berkelanjutan-----	159
❖ Bab 18: Menavigasi Masa Depan Kontrak Berbasis Kinerja di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi Menuju Keunggulan -----	167

PENUTUP

LANGKAH NYATA MENUJU PENGADAAN

BERBASIS KINERJA 🚀🎯-----	173
❖ Rangkuman Poin-Poin Kunci 🔑🌟 -----	174
❖ Ajakan untuk Aksi (<i>Call to Action</i>) kepada Para Pemangku Kepentingan 🗣️💛 -----	176

DAFTAR KUTIPAN -----	179
-----------------------------	------------

BIODATA PENULIS -----	193
------------------------------	------------

DAFTAR KUTIPAN

1. bahan buku.docx
2. Perpres No. 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Resmi Diterbitkan | LINTASDIKLAT, diakses Mei 22, 2025, <https://www.lintasdiklat.id/perpres-no-46-tahun-2025-tentang-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-resmi-diterbitkan/>
3. diakses Januari 1, 1970, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/peraturan-presiden-nomor-46-tahun-2025/1>
4. PP Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 - DJPb - Kementerian Keuangan, diakses Mei 22, 2025, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/purwodadi/id/data-publikasi/peraturan-lain/3120-pp-nomor-46-tahun-2025-tentang-perubahan-kedua-atas-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018.html>
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang ... - JDIH LKPP, diakses Mei 22, 2025, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-46-tahun-2025>
6. 2025perpres46.pdf - JDIH, diakses Mei 22, 2025, <https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/Perpres/2025/04/2025perpres46.pdf>
7. Perpres No. 46 Tahun 2025 - Peraturan BPK, diakses Mei 22, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647/perpres-no-46-tahun-2025>
8. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP - LPSE

- Jakarta, diakses Mei 22, 2025, <https://lpse.jakarta.go.id/eproc4/pengumuman/10001850000>
9. Ketentuan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), diakses Mei 22, 2025, <https://www.kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com/2020/12/ketentuan-terhadap-ppk.html>
 10. perbedaan perpres 2021 dengan 2025 - Scribd, diakses Mei 22, 2025, <https://id.scribd.com/document/856329054/perbedaan-perpres-2021-dengan-2025>
 11. peraturan.bpk.go.id, diakses Mei 22, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/211174/Peraturan%20Lembaga%20Nomor%205%20Tahun%202022.pdf>
 12. www.dhs.gov, diakses Mei 22, 2025, https://www.dhs.gov/sites/default/files/2025-01/25_0116_cpo_A%20Practical%20Guide%20To%20Improving%20Procurement%20Outcomes%20With%20The%20Right%20Requirements%20%281%29.pdf
 13. Statement of Work - Performance Work Statement - Statement of Objectives | www.dau.edu, diakses Mei 22, 2025, <https://www.dau.edu/acquipedia-article/statement-work-performance-work-statement-statement-objectives>
 14. Tips Menyusun KPI untuk Organisasi Pengadaan - LSP Pengadaan ..., diakses Mei 22, 2025, <https://lspPengadaan.id/tips-menyusun-kpi-untuk-organisasi-pengadaan/>
 15. Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja Utama | PDF - Scribd, diakses Mei 22, 2025, <https://id.scribd.com/doc/56048836/Langkah-Langkah-Menyusun-Indikator-Kinerja-Utama>
 16. Bagaimana Menyusun Rencana Mitigasi Risiko Kontrak ..., diakses Mei 22, 2025, <https://pengadaan.or.id/2025/04/28/bagaimana-menyusun-rencana-mitigasi-risiko-kontrak/>

17. Law, Econ, & Incentive Contracts: A Brief Guide - Number Analytics, diakses Mei 22, 2025, <https://www.numberanalytics.com/blog/law-econ-incentive-contracts-guide>
18. Incentive Contracts in Construction: Types, Pros, Cons, and Best ..., diakses Mei 22, 2025, <https://www.mastt.com/blogs/incentive-contracts>
19. How to Set a KPI Baseline to Monitor Improvement - Stacey Barr ..., diakses Mei 22, 2025, <https://www.staceybarr.com/measure-up/set-kpi-baseline-monitor-improvement/>
20. Performance Measurement Baseline: The Ultimate Guide to Project ..., diakses Mei 22, 2025, <https://www.6sigma.us/project-management/performance-measurement-baseline/>
21. [ppp.worldbank.org](https://ppp.worldbank.org/sites/default/files/2024-08/GIHub_Allocating_Risks_PPP_Contracts_EN_2016.pdf), diakses Mei 22, 2025, https://ppp.worldbank.org/sites/default/files/2024-08/GIHub_Allocating_Risks_PPP_Contracts_EN_2016.pdf
22. analisis penerapan key performance indicators (kpi) dalam upaya meningkatkan kecakapan pegawai - Jurnal PNJ, diakses Mei 22, 2025, <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/JAP/article/download/7049/3421/24620>
23. SMART-C, Kunci Penyusunan Indeks Kinerja Utama - Djkn.kemenkeu.go.id, diakses Mei 22, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalut/baca-berita/23699/Sosialisasi-Pengelolaan-Kinerja-SMART-C-Kunci-Penyusunan-Indeks-Kinerja-Utama.html>
24. Optimalkan Kinerja Pengadaan dengan KPI Procurement - MyRobin, diakses Mei 22, 2025, <https://myrobin.id/pojok-hrd/kpi-procurement/>
25. Contoh Key Performance Indicator (KPI) Di Berbagai Bidang - Talenta, diakses Mei 22, 2025, <https://www.talenta.co/blog/mengenal-key-performance-indikator-dan-contohnya/>
26. Procurement | Strategi Proyek, Pasar, Mitigasi Risiko - SMS

- Perkasa, diakses Mei 22, 2025, <https://www.smsperkasa.com/blog/procurement-strategi-proyek-pasar-mitigasi-risiko>
27. Reference Guide - World Bank PPP, diakses Mei 22, 2025, <https://ppp.worldbank.org/sites/default/files/2024-08/PPP%20Reference%20Guide%20Version%203.pdf>
 28. ESAIR'08 - ECIR 2008, diakses Mei 22, 2025, http://ecir2008.dcs.gla.ac.uk/t_w_pdf/w3.pdf
 29. ANNUAL REPORT - Tranquilidade, diakses Mei 22, 2025, <https://www.generalitranquilidade.pt/-/media/files/contas-individuais/rcindividuais21en.pdf?rev=7627406d1cae4ac1be8c2477c624f7f9>
 30. A Practical Guide to Performance-Based Budgeting in Public Policy - Number Analytics, diakses Mei 22, 2025, <https://www.numberanalytics.com/blog/guide-performance-based-budgeting-public-policy>
 31. 5 Risk Allocation - FHWA - Center for Innovative Finance Support - P3 Toolkit: Publications - Other Guides, diakses Mei 22, 2025, https://www.fhwa.dot.gov/ipd/p3/toolkit/publications/other_guides/risk_assessment/ch_5.a.spx
 32. The comprehensive guide to bonus allocation: Best practices and strategies, diakses Mei 22, 2025, <https://www.talentnetgroup.com/vn/featured-insights/rewards/employee-bonus-best-practices-strategies>
 33. How To Design Effective Annual Incentive Plans - ShareWillow, diakses Mei 22, 2025, <https://www.sharewillow.com/blog/annual-incentive-plans>
 34. buy.gsa.gov, diakses Mei 22, 2025, <https://buy.gsa.gov/api/system/files/documents/ArmyPWS.pdf>
 35. Performance contract template - free to use - Juro, diakses Mei 22, 2025, <https://juro.com/contract-templates/performance-contract>
 36. ppp.worldbank.org, diakses Mei 22, 2025, <https://>

- ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/default/files/2022-06/Lesson-learned-performance-based-road_0.pdf
37. Guide to Performance-Based Road Maintenance Contracts | Asian ..., diakses Mei 22, 2025, <https://www.adb.org/documents/guide-performance-based-road-maintenance-contracts>
 38. Performance Based Logistics (PBL) Guidebook - DAU, diakses Mei 22, 2025, <https://www.dau.edu/sites/default/files/Migrated/ToolAttachments/Performance-Based-Logistics-%28PBL%29-Guidebook.pdf>
 39. www.adb.org, diakses Mei 22, 2025, <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/935316/pbrm-contracts-carec-region.pdf>
 40. 35 Healthcare KPIs to Track in 2025 | NetSuite, diakses Mei 22, 2025, <https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/healthcare-kpis.shtml>
 41. Procurement KPIs: a complete list - Sievo, diakses Mei 22, 2025, <https://sievo.com/blog/procurement-kpis>
 42. 14 KPIs in Facility Management You Need to Start Tracking Today, diakses Mei 22, 2025, <https://truein.com/gcc/blogs/facility-management-kpis/>
 43. Design Build Operate Maintain (DBOM) - FHWA - Center for ..., diakses Mei 22, 2025, https://www.fhwa.dot.gov/ipd/alternative_project_delivery/defined/new_build_facilities/dbom.aspx
 44. 8 Consulting Services KPIs That Matter Now | NetSuite, diakses Mei 22, 2025, <https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/financial-management/kpis-consulting-services.shtml>
 45. Unlock Success with 7 Essential Key Performance Indicators (KPIs), diakses Mei 22, 2025, <https://www.simplifyfleet.app/blog/improve-your-fleet-management-process-7-crucial-kpis>
 46. Service Desk KPIs. Measure performance with these 15 metrics., diakses Mei 22, 2025, <https://deviniti.com/>

- blog/customer-it-service/service-desk-kpis-measuring-performance-15-essential-metrics/
47. KPIs and the cleaning industry - REMI Network, diakses Mei 22, 2025, <https://www.reminetwork.com/articles/kpis-and-the-cleaning-industry/>
 48. 8 KPIs for Security Guards You Need To Track | Belfry Software, diakses Mei 22, 2025, <https://www.belfrysoftware.com/blog/kpi-for-security-guards>
 49. Catering Services KPIs - Flevy.com, diakses Mei 22, 2025, <https://flevy.com/kpi-library/industry/catering-services-415>
 50. The Must-Have Call Center KPIs | Invensis, diakses Mei 22, 2025, <https://www.invensis.net/blog/call-center-kpis>
 51. 10 Facility Management KPIs You Need Start Tracking - Limble CMMS, diakses Mei 22, 2025, <https://limblecmms.com/blog/facility-management-kpis/>
 52. Key Performance Indicators in Construction: Measuring Success & Efficiency - OnIndus, diakses Mei 22, 2025, <https://www.onindus.com/key-performance-indicators-in-construction/>
 53. What 5 Metrics Should You Track for Your Medical Equipment ..., diakses Mei 22, 2025, <https://businessplan-templates.com/blogs/metrics/medical-equipment>
 54. 15 Most Important Procurement KPIs to Measure in 2025 | Cflow, diakses Mei 22, 2025, <https://www.cflowapps.com/procurement/procurement-kpis/>
 55. 8 Key Construction KPIs for Measuring Success - Procore, diakses Mei 22, 2025, <https://www.procore.com/library/construction-kpis>
 56. Performance-based contracts: Promoting quality road maintenance and economic efficiency, diakses Mei 22, 2025, <https://blogs.worldbank.org/en/transport/performance-based-contracts-promoting-quality-road-maintenance-and-economic-efficiency>
 57. DoD Performance Based Logistics (PBL) Guidebook | www.dau.edu, diakses Mei 22, 2025,

- <https://www.dau.edu/tools/dod-performance-based-logistics-pbl-guidebook>
58. How to Measure Healthcare Supply Chain Management Initiatives - GHX, diakses Mei 22, 2025, <https://www.ghx.com/the-healthcare-hub/healthcare-supply-chain-metrics-guide/>
 59. 20 Best Logistics KPIs and Metric Examples for 2025 Reporting - insightsoftware, diakses Mei 22, 2025, <https://insightsoftware.com/blog/20-best-logistics-kpis-and-metric-examples/>
 60. 35 Procurement KPIs to Know & Measure - NetSuite, diakses Mei 22, 2025, <https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/procurement-kpis.shtml>
 61. Your Guide to Facilities Management KPIs - FMX, diakses Mei 22, 2025, <https://www.gofmx.com/blog/facilities-management-kpis/>
 62. 40 KPI Examples for the Service Industry in 2025 - Rhythm Systems, diakses Mei 22, 2025, <https://www.rhythmsystems.com/blog/service-industry-kpi-examples>
 63. Top 10 Incident Management Metrics to Monitor - PagerDuty, diakses Mei 22, 2025, <https://www.pagerduty.com/resources/uncategorized/learn/top-10-incident-management-metrics-2021/>
 64. Accommodation and Food Service Industry KPI Examples - Spider Strategies, diakses Mei 22, 2025, <https://www.spiderstrategies.com/kpi/industry/accommodation-and-food-services/>
 65. 170 Key Performance Indicator (KPI) Examples & Templates - Qlik, diakses Mei 22, 2025, <https://www.qlik.com/us/kpi/kpi-examples>
 66. What is Contract Performance? Importance, Metrics, and Best Practices | Icertis, diakses Mei 22, 2025, <https://www.icertis.com/learn/what-is-contract-performance/>
 67. Construction KPI Examples | Construction Industry KPIs - Spider Strategies, diakses Mei 22, 2025, <https://www.s>

- piderstrategies.com/kpi/industry/construction/
68. 25 KPIs Every Procurement Team Should Track and Measure - Brex, diakses Mei 22, 2025, <https://www.brex.com/spend-trends/procurement/procurement-kpis>
 69. 11 Must-Know Procurement KPIs to Drive Efficiency & Cost Savings - Kissflow, diakses Mei 22, 2025, <https://kissflow.com/procurement/procurement-kpis/>
 70. KPIs in Energy Services: Defining metrics for construction - BrickControl, diakses Mei 22, 2025, <https://www.brickcontrol.com/blog/kpis-energy-efficiency/>
 71. TOWARDS PUBLIC PROCUREMENT KEY PERFORMANCE INDICATORS - World Bank, diakses Mei 22, 2025, <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/ECA/public-procurement-forum10-eca/tr-procurement-oecd-paulo-magina.pdf>
 72. Public Sector Contract Management: Navigating Key Elements | Blog, diakses Mei 22, 2025, <https://www.mydock365.com/public-sector-contract-management>
 73. accountability-framework.org, diakses Mei 22, 2025, <https://accountability-framework.org/fileadmin/uploads/afi/Documents/Management-of-Non-Compliant-Suppliers-Accountability-Framework.pdf>
 74. Non-Conformity Reports (NCR) in Procurement - step 1 - Blog, diakses Mei 22, 2025, <https://blog.learnhowtosource.com/understanding-non-conformity-reports/>
 75. ieg.worldbankgroup.org, diakses Mei 22, 2025, <https://ieg.worldbankgroup.org/reports/monitoring-and-evaluation-some-tools-methods-and-approaches-0>
 76. Public Procurement 2025 - Comparisons | Global Practice Guides ..., diakses Mei 22, 2025, <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/comparison/1029/16015/24804-24805-24806->

24807-24808

77. [www.giz.de](https://www.giz.de/en/downloads/giz-indonesia-SPP-m-and-e-needs-assessment-design-STAP.pdf), diakses Mei 22, 2025, <https://www.giz.de/en/downloads/giz-indonesia-SPP-m-and-e-needs-assessment-design-STAP.pdf>
78. Comparative Analysis of Project Development Effectiveness Management Tools for Sovereign Guaranteed Operations of the AfDB, ADB, - Publications, diakses Mei 22, 2025, <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Comparative-Analysis-of-Project-Development-Effectiveness-Management-Tools-for-Sovereign-Guaranteed-Operations-of-the-AfDB-ADB-IDB-IFAD-and-WB.pdf>
79. [documents.worldbank.org](https://documents.worldbank.org/curated/en/649511468314708749/pdf/448210PUB0Box0101official0use0only1.pdf), diakses Mei 22, 2025, <https://documents.worldbank.org/curated/en/649511468314708749/pdf/448210PUB0Box0101official0use0only1.pdf>
80. A How-To Guide For Managers And Commissioners Of Evaluation, diakses Mei 22, 2025, <https://ieg.worldbankgroup.org/reports/managing-evaluations-how-guide-managers-and-commissioners-evaluations>
81. TENDER DOCUMENTS - Indian Embassy Berlin, diakses Mei 22, 2025, https://indianembassyberlin.gov.in/pdf/tender/Tender_Documents_06-05-2025.pdf
82. The Validity of Goods/Services Contracts Signed by Commitment Making Officials Who Do Not Have A Certificate of Competency - ResearchGate, diakses Mei 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/381276064_The_Validity_of_GoodsServices_Contracts_Signed_by_Commitment_Making_Officials_Who_Do_Not_Have_A_Certificate_of_Competency
83. Long-Term Action Plan for Sustainable Public Procurement in Indonesia | GIZ, diakses Mei 22, 2025, <https://www.giz.de/en/downloads/giz-indonesia-SPP-LTAP.pdf>

84. NOTULENSI - siukpbj lkpp, diakses Mei 22, 2025, https://siukpbj.lkpp.go.id/uploads/posts/2019_11_18_Notulensi%20Rakornas%20Pengadaan%202019.pdf
85. media.neliti.com, diakses Mei 22, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/78367-ID-studi-penerapan-kontrak-berbasis-kinerja.pdf>
86. 6 steps for civic monitors to identify fraud risks in procurement in ..., diakses Mei 22, 2025, <https://www.open-contracting.org/2025/02/20/6-steps-for-civic-monitors-to-identify-fraud-risks-in-procurement-in-indonesia/>
87. RANCANGAN Rencana Strategis LKPP Tahun 2020 – 2024 - Peraturan BPK, diakses Mei 22, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/330048/Peraturan%20Lembaga%20Nomor%204%20Tahun%202023.pdf>
88. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara E-Procurement Di Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tes, diakses Mei 22, 2025, <https://library.fisip-unmul.ac.id/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=51ee547af1ab8b0e3d3e42e94945efc7>
89. 34 Kontrak Berbasis Kinerja Di Indonesia Performance Based On Contract In Indonesia Hanie Teki Tjendani Dan Herry Widhiarto Prog, diakses Mei 22, 2025, <https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/DeTeksi/article/download/120/102/>
90. Partners in crime prevention: How civil society and government worked together to open up public contracts in Indonesia, diakses Mei 22, 2025, <https://www.open-contracting.org/2022/04/27/a-partnership-for-better-procurement-how-civil-society-and-government-worked-together-to-open-up-public-contracts-in-indonesia/>
91. Empowering auditors: Indonesia uses data-driven oversight to clean up its corruption-prone procurement sector - Open Contracting Partnership, diakses Mei 22, 2025, <https://www.open-contracting.org/2024/08/28/empowering-auditors-indonesia-uses-data-driven->

- oversight-to-clean-up-its-corruption-prone-procurement-sector/
92. The political economy of open contracting reforms in low- and middle-income countries - Sussex Figshare, diakses Mei 22, 2025, https://sussex.figshare.com/articles/journal_contribution/The_political_economy_of_open_contracting_reforms_in_low-_and_middle-income_countries/26524468/1/files/49245067.pdf
 93. Public Procurement Reform: How Far Have We Come? - ICW, diakses Mei 22, 2025, <https://antikorupsi.org/en/article/a-decade-of-e-procurement-in-indonesia>
 94. Full article: Procurement governance in reducing corruption in the Indonesian public sector: a mixed method approach - Taylor & Francis Online, diakses Mei 22, 2025, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2024.2393744?af=R>
 95. jdih.lkpp.go.id, diakses Mei 22, 2025, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/peraturan-lkpp-nomor-7-tahun-2021/1>
 96. RANCANGAN Rencana Strategis LKPP Tahun 2020 – 2024, diakses Mei 22, 2025, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/peraturan-lkpp-nomor-4-tahun-2023/1>
 97. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan - BNSP - LPKN, diakses Mei 22, 2025, <https://event.lpkn.id/event/certified-procurement-specialist-cpsp>
 98. Ujian Sertifikasi PBJ Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, diakses Mei 22, 2025, <https://www.bimtekdiklat.co.id/ujian-sertifikasi-pbj/>
 99. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Surat Edaran Tentang Tipologi Pejabat Pembuat Komitm - Jdih Lkpp, diakses Mei 22, 2025, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/surat-edaran-kepala-lkpp-nomor-8-tahun-2020/1>
 100. Diskusi ke-13 UU Kesehatan Perkembangan Academic Health System (AHS) - Kebijakan Kesehatan Indonesia, diakses Mei 22, 2025, <https://kebijakankesehatanind>

- onesia.net/32-pelatihan?start=48
101. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, diakses Mei 22, 2025, <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf>
 102. lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah - JDIH LKPP, diakses Mei 22, 2025, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/peraturan-lkpp-nomor-4-tahun-2021/1>
 103. PANDuan Governance, Risk AnD Compliance (GRC), diakses Mei 22, 2025, <https://irmapa.org/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Panduan-Mencapai-Model-Keunggulan-GRC.pdf>
 104. lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah - JDIH LKPP, diakses Mei 22, 2025, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/peraturan-lkpp-nomor-11-tahun-2021/1>
 105. Rencana Strategis Universitas Halu Oleo Tahun 2020-2024 (Revisi Penyelarasan), diakses Mei 22, 2025, https://uho.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/Renstra_UHO_2020_2024_Penyelarasan.pdf
 106. Mengapa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Oleh Pa/Kpa Penting - Bppk Kemenkeu, Diakses Mei 22, 2025, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/pengumuman/mengapa-pengumuman-rencana-umum-pengadaan-oleh-pakpa-penting-242011>
 107. ppp.worldbank.org, diakses Mei 22, 2025, https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/default/files/2022-04/2_What_is_a_PBC.pdf
 108. Performance Contracting and Energy Service Agreements | US EPA, diakses Mei 22, 2025, <https://www.epa.gov/statelocalenergy/performance-contracting-and-energy-service-agreements>

109. eepartnership.org, diakses Mei 22, 2025, <https://eepartnership.org/wp-content/uploads/2019/10/ESPC-from-the-Experts-Website-Formatting.pdf>
110. The Performance of Performance-based Contracting in Human Services: A Quasi-experiment - APPAM, diakses Mei 22, 2025, http://www.appam.org/assets/1/7/The_Performance_of_Performance_based_Contracting_in_Human_Services_A_Quasi_experiment.pdf
111. Jenis Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Hukum Positif Indonesia, diakses Mei 22, 2025, <https://rendratopan.com/2019/11/18/jenis-kontrak-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/>
112. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pasca Perpres 16/2018, diakses Mei 22, 2025, https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_24092019133212.pdf
113. www.nyc.gov, diakses Mei 22, 2025, https://www.nyc.gov/assets/nonprofits/downloads/pdf/Guide%20to%20Performance_Based%20Contracting%20PDF.pdf
114. Public procurement performance A framework for measuring efficiency, compliance and strategic goals, diakses Mei 22, 2025, <https://read.oecd.org/10.1787/0dde73f4-en>
115. DOE Acquisition Guide- - Performance Based Service Acquisition - Department of Energy, diakses Mei 22, 2025, https://energy.gov/sites/prod/files/37.2_Performance_Based_Service_Acquisition_0.pdf
116. Subpart 37.6 - Performance-Based Acquisition, diakses Mei 22, 2025, <https://www.acquisition.gov/far/subpart-37.6>
117. Manajemen Kontrak Berbasis Kinerja | PDF - Scribd, diakses Mei 22, 2025, <https://id.scribd.com/document/502228096/Manajemen-Kontrak-Berbasis-Kinerja>
118. Identifikasi Risiko Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja Pada Pemeliharaan Bangunan Gedung - E-Journal Undip, diakses Mei 22, 2025, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpii/article/download/17196/8535>

119. Subpart 32.10 - Performance-Based Payments - Acquisition.GOV, diakses Mei 22, 2025, <https://www.acquisition.gov/far/subpart-32.10>
120. Featured Tools: Performance-based Contracting Resource Guide - World Bank Blogs, diakses Mei 22, 2025, <https://blogs.worldbank.org/en/transport/featured-tools-performance-based-contracting-resource-guide>
121. Using Rated Criteria to Select Civil Works Contractors in the Transport Sector - World Bank Documents and Reports, diakses Mei 22, 2025, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099811311152436515/pdf/IDU11bb0e52e16c6b14de91ab8a18efc973f336c.pdf>
122. Performance-Based Contracts: A Smart Way to Pay for Results ..., diakses Mei 22, 2025, <https://company.getinsured.com/performance-based-contracts-a-smart-way-to-pay-for-results/>
123. Change for the Better: Today's Path to a State-Based Exchange - GetInsured, diakses Mei 22, 2025, <https://company.getinsured.com/change-for-the-better-todays-path-to-a-state-based-exchange/>
124. Performance-Based Payments | www.dau.edu, diakses Mei 22, 2025, <https://www.dau.edu/acquipedia-article/performance-based-payments>
125. Capitation Management Through Performance-Based Capitation Mechanism of Primary Health Care in Malang, Indonesia - UI Scholars Hub, diakses Mei 22, 2025, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=kesmas>
126. Performance Based Payments Guide - DAU, diakses Mei 22, 2025, <https://www.dau.edu/sites/default/files/Migrated/ToolAttachments/Performance-Based-Payments-%28PBP%29-Guidebook.pdf>

BIODATA PENULIS

AGUS ARIF RAKHMAN, M.M., CPSP.



Agus Arif Rakhman adalah Pengelola Pengadaan Ahli Madya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Republik Indonesia, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan nasional. Keahliannya yang mendalam dalam bidang ini diakui melalui perannya sebagai Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Sebagai Probitry Advisor LKPP RI, Agus memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan transparansi proses pengadaan di tingkat nasional. Pengalamannya yang luas mencakup penyusunan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan model dokumen pengadaan, yang telah menjadi acuan penting dalam standardisasi proses pengadaan di berbagai instansi pemerintah.

Arif juga dikenal sebagai penulis produktif dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Buku-bukunya telah menjadi sumber referensi yang berharga bagi praktisi dan akademisi di seluruh Indonesia. Kontribusinya dalam tim penyusun peraturan LKPP semakin memperkuat perannya sebagai tokoh kunci dalam membentuk kebijakan pengadaan di tingkat nasional.

Dengan kombinasi unik antara keahlian teknis, pengalaman praktis, dan kemampuan menulis, Agus Arif Rakhman terus berdedikasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas dalam dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Karyanya tidak hanya membentuk praktik terbaik saat ini, tetapi juga menginspirasi generasi mendatang dari para profesional pengadaan.

SASTYO AJI DARMAWAN, S.H., M.E.



Sastyo Aji Darmawan adalah Ahli Muda Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum. Selain aktif di dunia pengadaan barang/jasa, ia juga aktif sebagai Penyuluh Antikorupsi di Jakarta Anticorruption Forum (JARUM) Integritas.

Sastyo berperan aktif dalam mendorong peningkatan integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Ia mengulas isu-isu tentang pengadaan barang/jasa dan tindak pidana korupsi melalui tulisannya di blog Kompasiana, website DPD IAPI Jakarta, Jurnal IFPI dan Jurnal Pengadaan Indonesia. Kegemarannya menulis mendorongnya ditunjuk sebagai Ketua Bidang Publikasi dan Literasi pada DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia sejak tahun 2024.

Buku yang telah ia tulis diantaranya Merdeka Dari Merencanakan Kegagalan (2021) dan Jangan Anti-Pengadaan! (2022). Kali ini, bersama guru, sahabat dan panutannya dalam dunia pengadaan, Agus Arif Rakhman, ia turut mendukung tersusunnya buku penerapan Kontrak Berbasis Kinerja dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.